



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA  
BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA  
004 01 01 662745**



**Untuk Periode Yang Berakhir  
31 Desember 2022  
Audited**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah entitas akuntansi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Penyusunan Laporan Keuangan Satuan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Proses penyusunan Laporan Keuangan ini telah menggunakan Sistem Aplikasi dan Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sistem ini mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja negara pada instansi pemerintah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 27 April 2023

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta



Ayub Amali S.E., M.M., Ak., CA., CSFA *ah*  
NIP 196903211996031002

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	1
III. Laporan Operasional	2
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	2
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	9
A. 1. Dasar Hukum	9
A. 2. Profil dan Kebijakan Teknis BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	11
A. 3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A. 4. Basis Akuntansi	16
A. 5. Dasar Pengukuran	16
A. 6. Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31
B. 1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	31
B. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	41
C. 1. Penjelasan Umum Neraca	41
C. 2. Penjelasan Per Pos Neraca	41
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	67
D. 1. Penjelasan Umum Laporan Operasional	67
D. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional	67
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	75
E. 1. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	75
E. 2. Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	75
F. Pengungkapan Penting Lainnya	81
F. 1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	81
F. 2. Pengungkapan Lain-lain	81
F. 3. Rekening Pemerintah	81
F. 4. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan oleh KAP	81
VI. Lampiran A.2 A.3 serta Lampiran 1 – 30	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Penggolongan Kualitas Piutang 22
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset 27
Tabel 3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 31
Tabel 4	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 31
Tabel 5	Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 32
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 33
Tabel 7	Anggaran dan Realisasi Belanja Jenis Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 34
Tabel 8	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 34
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 34
Tabel 10	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 35
Tabel 11	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 36
Tabel 12	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 37
Tabel 13	Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 38
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 40
Tabel 15	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 40
Tabel 16	Komposisi Perbandingan Neraca Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 41
Tabel 17	Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 41
Tabel 18	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 42
Tabel 19	Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 43
Tabel 20	Rincian Mutasi Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 44
Tabel 21	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 45
Tabel 22	Rincian Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 46

Tabel 23	Rincian Perbandingan Persediaan pada Modul GLP dan Modul Persediaan per 31 Desember 2022	47
Tabel 24	Rincian Nilai Persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Per 31 Desember 2022	47
Tabel 25	Rincian Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	48
Tabel 26	Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Modul GLP dan Modul Aset Tetap per 31 Desember 2022	48
Tabel 27	Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2022	48
Tabel 28	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	50
Tabel 29	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	52
Tabel 30	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022	53
Tabel 31	Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022	54
Tabel 32	Rincian Mutasi Irigasi per 31 Desember 2022	55
Tabel 33	Rincian Mutasi Jaringan per 31 Desember 2022	56
Tabel 34	Rincian Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2022	57
Tabel 35	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	58
Tabel 36	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	59
Tabel 37	Rincian Perbandingan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	61
Tabel 38	Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022	61
Tabel 39	Rincian Mutasi <i>Software</i> per 31 Desember 2022	62
Tabel 40	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	63
Tabel 41	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022	64
Tabel 42	Rincian Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022	64
Tabel 43	Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022	66
Tabel 44	Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	67
Tabel 45	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	68
Tabel 46	Rincian Perbandingan Beban Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	69
Tabel 47	Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	69
Tabel 48	Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	70
Tabel 49	Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	70
Tabel 50	Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	71
Tabel 51	Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	71
Tabel 52	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	72

Tabel 53	Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	73
Tabel 54	Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	73
Tabel 55	Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	74
Tabel 56	Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	75
Tabel 57	Rincian Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	76
Tabel 58	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	78
Tabel 59	Rincian Nilai Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	78
Tabel 60	Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	79
Tabel 61	Tabel Rincian Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022	80

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**KEPALA PERWAKILAN BPK PROVINSI DKI JAKARTA**

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 27 April 2023  
Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta

  
Ayub Amali S.E., M.M., Ak., CA., CSFA *rh*  
H/s NIP 196903211996031002



## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.061.000,00 dan sebesar Rp33.154.591.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp135.571.868,00 atau mencapai 500,99% dari Estimasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.019.006.585,00 atau mencapai 99,59% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

### II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp293.677.675.968,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp738.541.369,00, Aset Tetap sebesar Rp292.939.134.599,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp623.127.183,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp293.054.548.785,00.



### **III. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp112.243.043,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp36.351.667.413,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp36.239.424.370,00.

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp97.077.333,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp36.142.347.037,00.

### **IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp296.327.853.359,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp36.142.347.037,00 kemudian ditambah dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp129.323.004,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp32.998.365.467,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp293.054.548.785,00.

### **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022		% thd Angg	TAHUN 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1	27.061.000,00	135.571.868,00	500,99	482.738.346,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>27.061.000,00</b>	<b>135.571.868,00</b>	<b>500,99</b>	<b>482.738.346,00</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	12.071.884.000,00	12.055.755.147,00	99,87	11.391.910.987,00
Belanja Barang	B.2.2.2	20.139.007.000,00	20.026.237.477,00	99,44	21.244.875.685,00
Belanja Modal	B.2.2.3	943.700.000,00	937.013.961,00	99,29	887.696.490,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>33.154.591.000,00</b>	<b>33.019.006.585,00</b>	<b>99,59</b>	<b>33.524.483.162,00</b>

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 Audited

**NERACA**

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.2.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2	0,00	0,00
Belanja Dibayar di Muka	C.2.1.3	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.4	3.720.000,00	22.037.649,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.5	(18.600,00)	(110.188,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.2.1.6	0,00	0,00
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.2.1.7	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.2.1.8	0,00	0,00
Persediaan	C.2.1.8	734.839.969,00	924.356.815,00
Jumlah Aset Lancar		738.541.369,00	946.284.276,00
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2.2</b>		
Tanah	C.2.2.1	175.888.101.000,00	175.888.101.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	57.165.974.752,00	57.102.007.851,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	117.849.869.146,00	117.446.145.385,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	46.482.874.463,00	46.482.874.463,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	393.730.121,00	390.961.871,00
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.2.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.7	(104.841.414.883,00)	(101.290.774.649,00)
Jumlah Aset Tetap		292.939.134.599,00	296.019.315.921,00
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.2.3</b>		
Tagihan TP/TGR	C.2.3.1	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3.2	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.2.4</b>		
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1	1.200.182.673,00	1.200.182.673,00
Aset Lain-Lain	C.2.4.2	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.3	(1.200.182.673,00)	(1.200.182.673,00)
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>293.677.675.968,00</b>	<b>296.965.600.197,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.2.5</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1	331.539.549,00	235.200.131,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.5.2	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.5.3	291.587.634,00	402.546.707,00
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		623.127.183,00	637.746.838,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>623.127.183,00</b>	<b>637.746.838,00</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>C.2.6</b>		
Ekuitas		293.054.548.785,00	296.327.853.359,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>293.054.548.785,00</b>	<b>296.327.853.359,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>293.677.675.968,00</b>	<b>296.965.600.197,00</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini – Halaman 6

## LAPORAN OPERASIONAL

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERKAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1	112.243.043,00	63.601.294,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>112.243.043,00</b>	<b>63.601.294,00</b>
<b>BEBAN</b>			
	D.2.2		
Beban Pegawai	D.2.2.1	12.096.111.469,00	11.362.021.309,00
Beban Persediaan	D.2.2.2	929.000.447,00	1.148.978.399,00
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.3	7.359.898.776,00	7.293.600.300,00
Beban Pemeliharaan	D.2.2.4	5.885.090.217,00	5.256.041.146,00
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.5	5.975.774.471,00	7.386.582.725,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.2.6	4.105.792.033,00	4.168.106.508,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.2.7	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.2.2.8	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>36.351.667.413,00</b>	<b>36.615.330.387,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(36.239.424.370,00)</b>	<b>(36.551.729.093,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	D.2.3		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	D.2.3.1	97.077.333,00	89.237.890,00
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.3.2	0,00	(16.429,00)
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>97.077.333,00</b>	<b>89.221.461,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(36.142.347.037,00)</b>	<b>(36.462.507.632,00)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
	D.2.4		
Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(36.142.347.037,00)</b>	<b>(36.462.507.632,00)</b>

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERKAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.2.1	<b>296.327.853.359,00</b>	<b>297.338.158.369,00</b>
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	(36.142.347.037,00)	(36.462.507.632,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.2.3	(129.323.004,00)	(513.258.544,00)
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Penyesuaian Nilai Aset	E.2.3.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.2.3.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.2.3.3	0,00	(2.544.503.000,00)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.2.3.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.2.3.5	(133.544.100,00)	2.056.110.568,00
Koreksi Lain-lain	E.2.3.6	4.221.096,00	(24.866.112,00)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.4	32.998.365.467,00	35.965.461.166,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.2.5</b>	<b>293.054.548.785,00</b>	<b>296.327.853.359,00</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

##### *Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.



28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

## **A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

### **A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

#### *Profil*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

#### **1. Lingkup Tugas**

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:

- (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- (2) Pemeriksaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
- (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

## **2. Organisasi BPK**

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara, pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjeraan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

## **3. Pemangku Kepentingan**

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah;
- c. Instansi penegak hukum;
- d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f. Warga Negara Indonesia.

## **4. Kedudukan satker BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta**

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berada di bawah Auditorat Keuangan Negara V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat DKI Jakarta I;
- c. Subauditorat DKI Jakarta II;
- d. Subauditorat DKI Jakarta III;
- e. Subauditorat DKI Jakarta IV; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkududukan di Kota Jakarta.

#### **A.2.2 RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

##### *Rencana Strategis BPK*

Renstra Satker BPK Perwakilan DKI Jakarta disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK dan *Renstra AKN V 2020-2024*. Ringkasan Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi**

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

##### **2. Misi**

- a. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- b. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- c. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

##### **3. Nilai Dasar**

Penyusunan visi dan misi pada Renstra BPK Perwakilan DKI Jakarta 2020-2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

- a. Independensi Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.
- b. Integritas Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- c. Profesionalisme Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan,

serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

#### 4. Tujuan Strategis

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuannya yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

#### 5. Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran strategis (SS) yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

#### 6. Visualisasi Renstra Satker



#### 7. Indikator Kinerja Utama Satker

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta 2020-2024, ditetapkan satu tujuan strategis dan sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya, yaitu sebagai berikut.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%

### **A.2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

#### *Program dan Kegiatan BPK*

Dalam perencanaan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, rencana pembangunan nasional meliputi rencana jangka panjang dua puluh tahun, rencana jangka menengah lima tahunan dan perencanaan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional tahun 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJP Nasional tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahunan dan acuan RPJP Daerah.

RPJMN sebagai dokumen perencanaan memuat antara lain strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (KL) dan lintas KL, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RPJMN ini menjadi acuan Kementerian/Lembaga dalam menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L).

Dokumen perencanaan lima tahunan RPJMN dan Renstra K/L dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sementara alokasi anggaran tahunan setiap Kementerian/Lembaga dituangkan dalam dokumen perencanaan dana penganggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Dokumen perencanaan dan penganggaran RKA dan DIPA BPK terdiri dari dua Program yaitu pertama, Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Program Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendukung memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dalam RKA dan DIPA BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengampu Program Pemeriksaan Keuangan Negara dengan Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

### **A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### *Pendekatan Penyusunan*

Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi

*Laporan  
Keuangan*

Satuan Kerja. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep *single database*. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem single entry point, single database, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periode transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *audited*, dan *audited*.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

- Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
- Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
- Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

#### **A. 4. BASIS AKUNTANSI**

*Basis  
Akuntansi*

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A. 5. DASAR PENGUKURAN**

*Dasar  
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan

menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

##### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

##### *Pendapatan- LRA*

#### **1. Pendapatan- LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### *Pendapatan- LO*

#### **2. Pedapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;



- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan dari Pemindah Tangan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- Pendapatan Pelunasan ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan TP/TGR atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **3. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **4. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

### **5. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

*Aset Lancar*

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini, meliputi:

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri atas:
  - Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.
  - Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari:

- Pendapatan yang belum Disetor  
Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK serta gaji), jasa giro, penerimaan PNBK, dan lain-lain yang belum disetorkan.  
Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya  
Utang kepada pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa Honor, gaji/TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai, serta uang lainnya yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga lainnya pada tanggal

Neraca.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

▪ Belanja dibayar dimuka (*prepaid*)

Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitasnya dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanja dibayar di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun mau pun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

▪ Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Akun Piutang Bukan Pajak perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNB dengan kebijakan yaitu:

- Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus

Diterima yaitu:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

- Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas:

- Piutang PNBPN adalah pendapatan PNBPN tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNBPN yaitu:

- 1) Dasar pengakuan adalah Surat Tagihan/Surat Penetapan/Yang Dipersamakan.
- 2) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- 3) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Piutang PNBPN pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca, Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui jaminan/Bank Garansi).

- Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya berasal dari:

- 1) Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas; serta
- 2) Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah:

- 1) Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara.
- 2) Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan barang-barang operasional kegiatan tidak ditentukan dari jenis barangnya, melainkan dari niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA KLnya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja dalam jangka waktu pendek.

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 1. Barang habis pakai; 2. Barang tak habis pakai; dan 3. Barang bekas pakai.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan persediaan

meliputi: a. harga pembelian; b. biaya pengangkutan; c. biaya penanganan; d. biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode First In First Out (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN pengakuan perolehan aset tetap sejak 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Akibat dari penerapan perubahan kebijakan kapitalisasi aset tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, data BMN menjadi terbagi dua, yaitu:

- Daftar BMN Intrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan seluruh BMN yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan BMN yang diperoleh melalui transaksi Transfer Masuk/

Penerimaan dari pertukaran/Pengalihan Masuk serta BMN yang dipindahbukukan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

- Daftar BMN Ekstrakomptabel, mencakup BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Peralatan dan mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp1.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp1.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp10.000.000,00, dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp25.000.000,00 serta yang diperoleh dari pengalihan dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Gedung dan Bangunan yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 s.d. 31 Desember 2017 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp10.000.000,00 dan yang diperoleh sejak 1 Januari 2018 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp25.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Gedung dan Bangunan dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi



tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan Provinsi/Badiklat PKN);

- Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain.

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain).

Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Pada Badan Pemeriksa Keuangan RI revaluasi dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyajian hasil revaluasi BMN dalam Laporan Neraca (laporan posisi BMN di Neraca) disajikan dengan nilai wajar hasil revaluasi tanpa akumulasi penyusutan.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a. menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c. memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;
- d. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- e. Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- f. Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Moden)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Aset Lainnya meliputi:

- Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi, serta Aset Tak Berwujud Lainnya. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi amortisasi.

Pada Aset Lainnya—Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi mulai Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No. 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

- *Software* Komputer masa manfaat 4 tahun
  - Lisensi masa manfaat 10 tahun;
  - *Franchise* masa manfaat 5 tahun;
  - Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.I masa manfaat 70 tahun;
  - Hak Paten Sederhana masa manfaat 10 tahun;
  - Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II masa manfaat 50 tahun;
  - Paten Biasa masa manfaat 20 tahun;
  - Merek masa manfaat 10 tahun.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas dan disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## Kewajiban

### 6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK terdiri dari:

- Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari:

- Belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal; dan
- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya yang merupakan kontra akun dari Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/Lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Khusus untuk belanja modal yang masih harus dibayar tidak mempengaruhi beban laporan operasional, tetapi bersamaan dengan pengakuan belanja modal yang masih harus dibayar harus diakui adanya aset yang diperoleh. Dengan demikian apabila terdapat aset yang sudah diperoleh yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban.

Pada saat pembayaran belanja yang masih harus dibayar tahun sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan cara mendebet akun belanja yang masih harus dibayar dan mengkredit akun beban pada tanggal yang sama. Dalam hal penyesuaian tidak dapat dilakukan pada tanggal transaksi, maka harus diperhitungkan pada akhir tahun untuk menentukan besarnya nilai pada jurnal penyesuaian.

- Utang Yang Belum Ditagihkan adalah kewajiban yang berasal dari transaksi tagihan yang telah diproses oleh PPK namun belum sampai menjadi Surat Perintah Pembayaran.
- Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening kas negara tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan Diterima Dimuka di BPK antara lain berupa Pendapatan Sewa Diterima Dimuka. Pendapatan Sewa Diterima di Muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai kewajiban jangka pendek. Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari atau 366 hari jika tahun yang berkenaan kabisat) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
- Utang Jangka Pendek Lainnya Yaitu pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.
- Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Kewajiban Jangka Panjang  
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## Ekuitas

### 7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
<b>1</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>27.061.000,00</b>	<b>135.571.868,00</b>	<b>500,99</b>
	a. Penerimaan Pajak	0,00	0,00	0,00
	b. PNPB	27.061.000,00	135.571.868,00	500,99
	c. Hibah	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>33.154.591.000,00</b>	<b>33.019.006.585,00</b>	<b>99,59</b>
	- Belanja Rupiah Murni	33.154.591.000,00	33.019.006.585,00	99,59
	- Belanja Pinjaman LN	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Rupiah Pendamping	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Hibah LN	0,00	0,00	0,00
	- Belanja Barang Non Kas	0,00	0,00	0,00

Selama periode Tahun 2022 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awal, pagu awal sebesar Rp32.002.495.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp33.154.591.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan output Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja Tahun 2022 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 4

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
<b>1</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>27.061.000,00</b>	<b>27.061.000,00</b>
	a. Pendaatan Jasa	0,00	0,00
	b. Pendapatan Lain-lain	27.061.000,00	27.061.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>32.002.495.000,00</b>	<b>33.154.591.000,00</b>
	- Belanja Pegawai	12.384.882.000,00	12.071.884.000,00
	- Belanja Barang	19.083.913.000,00	20.139.007.000,00
	- Belanja Modal	533.700.000,00	943.700.000,00

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

## B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.2.1. PENDAPATAN

*Realisasi Pendapatan Rp135,57 juta* Realisasi Pendapatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp135.571.868,00 atau mencapai 500,99% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp27.061.000,00. Pendapatan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari Pendapatan Sewa dan Pendapatan dari pemindahtanganan BMN.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Estimasi dan Realisasi Pendapatan dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	0,00	101.433.333,00	100,00
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	27.061.000,00	1.283.970,00	4,74
3	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (42515)	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542)	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42569)	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening (42576)	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579)	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda I (42581)	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42591)	0,00	32.854.565,00	100,00
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan (42591)	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>27.061.000,00</b>	<b>135.571.868,00</b>	<b>500,99</b>

Realisasi pendapatan Tahun 2022 melampaui estimasi pendapatan disebabkan oleh:

1. Terdapat pendapatan dari pemindahtanganan BMN yang tidak ditargetkan estimasinya yang berasal dari Pendapatan atas Risalah Lelang No 569/27/2022 tanggal 13 September 2022 dan Risalah Lelang No 593/27/2022 tanggal 22 September 2022.
2. Terdapat pendapatan dari pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu yang merupakan pendapatan dari pengembalian belanja pegawai dan belanja barang TAYL.

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp347.166.478,00 atau sebesar 71,92% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp482.738.346,00.

Rincian perbandingan realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Hibah  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31  
Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan & Hibah	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (42512)	101.433.333,00	89.237.890,00	12.195.443,00	13,67
2	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (42513)	1.283.970,00	365.126.406,00	(363.842.436,00)	(99,65)
3	Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (42515)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (42542)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Jasa Lainnya (42569)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening (42576)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda I (42581)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I (42591)	32.854.565,00	28.374.050,00	4.480.515,00	15,79
10	Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan (42591)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Lain-Lain II (42599)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>135.571.868,00</b>	<b>482.738.346,00</b>	<b>(347.166.478,00)</b>	<b>(71,92)</b>

Realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami *penurunan* sebesar Rp347.166.478,00 dibanding Tahun 2021, hal ini antara lain disebabkan oleh penurunan Pendapatan dari Pemanfaatan Aset karena di Tahun 2021 terdapat pendapatan dari pemanfaatan BMN dari perbaharuan kontrak pendapatan sewa ruang untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Telekomunikasi dari tahun 2021 s.d. 2026 dengan nomor kontrak Nomor 01/PKS/XVIII.JKT/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

(Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 4,5)

#### B.2.2. BELANJA

Realisasi  
Belanja  
Negara  
Rp33.019,01  
juta

Realisasi Belanja Tahun 2022 adalah sebesar Rp33.019.006.585,00 atau 99,59% dari anggaran belanja sebesar Rp33.154.591.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022  
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	TA 2022		
		Anggaran	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	12.071.884.000,00	12.071.722.366,00	100,00
52	Belanja Barang	20.139.007.000,00	20.116.397.477,00	99,89
53	Belanja Modal	943.700.000,00	937.013.961,00	99,29
<b>Total Belanja Kotor</b>		<b>33.154.591.000,00</b>	<b>33.125.133.804,00</b>	<b>99,91</b>
Pengembalian Belanja		0,00	106.127.219,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.154.591.000,00</b>	<b>33.019.006.585,00</b>	<b>99,59</b>

Sedangkan menurut program, rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8  
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Program  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022  
(dalam Rupiah)

Kode	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	33.154.591.000,00	33.019.006.585,00	99,59
WA	Program Dukungan Manajemen	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.154.591.000,00</b>	<b>33.019.006.585,00</b>	<b>99,59</b>

Dibandingkan dengan Tahun 2021, Realisasi Belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,51% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi belanja Tahun 2022 dan Tahun 2021 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 9  
Perbandingan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Kode	Uraian Jenis Belanja	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	12.055.755.147,00	11.391.910.987,00	663.844.160,00	5,83
52	Belanja Barang	20.026.237.477,00	21.244.875.685,00	(1.218.638.208,00)	(5,74)
53	Belanja Modal	937.013.961,00	887.696.490,00	49.317.471,00	5,56
<b>Jumlah</b>		<b>33.019.006.585,00</b>	<b>33.524.483.162,00</b>	<b>(505.476.577,00)</b>	<b>(1,51)</b>

Penurunan realisasi belanja Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2021 antara lain terjadi karena penurunan realisasi belanja barang yang disebabkan pengurangan anggaran satker BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akibat refocusing anggaran untuk kegiatan covid-19.

(Laporan Realisasi Anggaran Belanja dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 2,3)

### B.2.2.1. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai Rp12.055,76 juta* Pagu anggaran untuk Belanja Pegawai adalah Rp12.071.884.000,00 dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp12.055.755.147,00 atau 99,87% dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan.

Realisasi dibawah anggaran sebesar Rp16.128.853,00 antara lain disebabkan terdapat pengembalian belanja pegawai di tahun 2022 sebesar Rp15.967.219,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp12.055.755.147,00 dan Rp11.391.910.987,00. Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,83% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan jumlah pegawai dan penambahan tunjangan jabatan pegawai.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 10  
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31  
Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
5111	Belanja gaji & tunjangan PNS	11.460.143.366,00	10.847.861.145,00	612.282.221,00	5,64
5113	Belanja gaji & tunjangan pejabat negara	0,00	0,00	0,00	0,00
5121	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	0,00
5122	Belanja Lembur	611.579.000,00	548.794.000,00	62.785.000,00	11,44
5124	Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>		<b>12.071.722.366,00</b>	<b>11.396.655.145,00</b>	<b>675.067.221,00</b>	<b>5,92</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>15.967.219,00</b>	<b>4.744.158,00</b>	<b>11.223.061,00</b>	<b>236,57</b>
<b>Jumlah Netto</b>		<b>12.055.755.147,00</b>	<b>11.391.910.987,00</b>	<b>663.844.160,00</b>	<b>5,83</b>

Realisasi Pengembalian Belanja Pegawai Tahun 2022 adalah sebesar Rp15.967.219,00 terdiri dari:

- Pengembalian belanja gaji pokok sebesar Rp8.616.353,00
- Pengembalian belanja Tunjangan-tunjangan sebesar Rp7.350.866,00

### B.2.2.2. Belanja Barang

*Belanja Barang Rp20.026,24 juta* Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah Rp20.139.007.000,00 dan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 sebesar Rp20.026.237.477,00 atau 99,89% dari alokasi Belanja Barang yang dianggarkan. Sisa anggaran anggaran sebesar Rp112.769.523,00 antara lain disebabkan terdapat anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi.

Realisasi belanja barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp20.026.237.477,00 dan Rp21.244.875.685,00. Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,74% dari 2021. Hal ini disebabkan antara lain pengurangan anggaran satker BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta akibat refocusing anggaran untuk kegiatan covid-19.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 11  
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31  
Desember 2021  
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	730.197.044,00	737.390.852,00	(7.193.808,00)	(0,98)
5212	Belanja Barang Non Operasional	3.160.401.702,00	3.614.909.892,00	(454.508.190,00)	(12,57)
5218	Belanja Barang Persediaan	654.992.862,00	1.154.539.905,00	(499.547.043,00)	(43,27)
5221	Belanja Jasa	3.420.364.342,00	2.914.341.830,00	506.022.512,00	17,36
5231	Belanja Pemeliharaan	6.081.147.056,00	5.416.743.135,00	664.403.921,00	12,27
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	6.069.294.471,00	7.432.150.071,00	(1.362.855.600,00)	(18,34)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>		<b>20.116.397.477,00</b>	<b>21.270.075.685,00</b>	<b>(1.153.678.208,00)</b>	<b>(5,42)</b>
Pengembalian Belanja		90.160.000,00	25.200.000,00	64.960.000,00	257,78
<b>Jumlah Netto</b>		<b>20.026.237.477,00</b>	<b>21.244.875.685,00</b>	<b>(1.218.638.208,00)</b>	<b>(5,74)</b>

Realisasi Pengembalian Belanja Barang Tahun 2022 adalah sebesar Rp90.160.000,00 seluruhnya merupakan Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp90.160.000,00.

Pada Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp185.988.000,00 dengan realisasi sebesar Rp185.925.030,00 atau 99,97%, yang terdiri dari:

Tabel 12

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk penanganan pandemi COVID-19 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Anggaran	Realisasi	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	69.995.000,00	69.951.170,00	99,94
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	104.233.000,00	104.219.860,00	99,99
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	11.760.000,00	11.754.000,00	99,95
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Barang (52) Tahun 2022 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp133.544.100,00.

*(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 32)*

### B.2.2.3. Belanja Modal

*Belanja Modal Rp937,01 juta* Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp943.700.000,00 dan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp937.013.961,00 atau 99,29% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan. Sisa anggaran sebesar Rp6.686.039,00 tidak terealisasi antara lain disebabkan adanya penghematan dalam realisasi belanja modal.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp937.013.961,00 dan Rp887.696.490,00. Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,56% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan realisasi belanja modal untuk pengadaan kebutuhan sarana Gedung dan Bangunan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dikantor.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 13  
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31  
Desember 2021

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533.290.200,00	664.500.000,00	(131.209.800,00)	(19,75)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	403.723.761,00	223.196.490,00	180.527.271,00	100,00
5361	Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Realisasi Belanja Bruto</b>		<b>937.013.961,00</b>	<b>887.696.490,00</b>	<b>49.317.471,00</b>	<b>5,56</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Netto</b>		<b>937.013.961,00</b>	<b>887.696.490,00</b>	<b>49.317.471,00</b>	<b>5,56</b>

Pada Tahun 2022 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tidak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Tanah	Rp	0,00
2	Kapitalisasi pada KDP	Rp	0,00
3	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2022 sebesar Rp533.290.200,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	511.312.200,00
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	0,00
3	Kapitalisasi pada Irigasi	Rp	0,00
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	0,00
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
6	Kapitalisasi pada Aset Tetap dalam Renovasi	Rp	0,00
7	Kapitalisasi pada Software	Rp	0,00
8	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	0,00
9	Tidak dikapitalisasi	Rp	21.978.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>533.290.200,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2022 sebesar Rp403.723.761,00 dikapitalisasi pada aset tetap sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	0,00
2	Kapitalisasi pada Gedung dan Bangunan	Rp	403.723.761,00
3	Kapitalisasi pada Jalan dan Jembatan	Rp	0,00
4	Kapitalisasi pada Jaringan	Rp	0,00
5	Kapitalisasi pada Aset Tetap Renovasi	Rp	0,00
6	Kapitalisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	0,00
7	Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	Rp	0,00
8	Tidak dikapitalisasi	Rp	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>403.723.761,00</b>

Realisasi Belanja Modal Lainnya pada Tahun 2022 sebesar Rp0,00 dikapitalisasi pada aset-aset sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Aset Tetap Lainnya	Rp	0,00
2	Kapitalisasi pada Aktiva Tetap dalam Renovasi	Rp	0,00
3	Kapitalisasi pada Software	Rp	0,00
4	Kapitalisasi pada Lisensi	Rp	0,00
5	Tidak dikapitalisasi	Rp	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>0,00</b>

*(Rincian Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 33)*

#### **B.2.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah Rp533.700.000,00 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp533.290.200,00 atau 99,92% dari alokasi belanja modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp533.290.200,00 dan Rp664.500.000,00. Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 19,75% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan berkurangnya anggaran pengadaan peralatan mesin di tahun 2022.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Komputer Unit	59.870.580,00	0,00	59.870.580,00	0,00
Peralatan	473.419.620,00	664.500.000,00	(191.080.380,00)	(28,76)
Realisasi Belanja Bruto	533.290.200,00	664.500.000,00	(131.209.800,00)	(19,75)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Netto	533.290.200,00	664.500.000,00	(131.209.800,00)	(19,75)

#### B.2.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah Rp410.000.000,00 dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp403.723.761,00 atau 98,47% dari alokasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah masing-masing sebesar Rp403.723.761,00 dan Rp223.196.490,00 Realisasi belanja Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 80,88% dari Tahun 2021. Hal ini disebabkan penambahan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana Gedung dan Bangunan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dikantor.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	TA 2022	TA 2021	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Gedung tempat kerja	403.723.761,00	223.196.490,00	180.527.271,00	80,88
Realisasi Belanja Bruto	403.723.761,00	223.196.490,00	180.527.271,00	80,88
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Netto	403.723.761,00	223.196.490,00	180.527.271,00	80,88



**C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**

**C.1. PENJELASAN UMUM NERACA**

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16  
Komposisi Perbandingan Neraca  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Aset	293.677.675.968,00	296.965.600.197,00	(1,11)
Kewajiban	623.127.183,00	637.746.838,00	(2,29)
Ekuitas	293.054.548.785,00	296.327.853.359,00	(1,10)

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp293.677.675.968,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp738.541.369,00, Aset Tetap sebesar Rp292.939.134.599,00, serta Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp623.127.183,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp293.054.548.785,00.

(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

**C.2. PENJELASAN PER POS NERACA**

**C.2.1. ASET LANCAR**

Aset Lancar  
Rp738,54 juta

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp738.541.369,00 dan Rp946.284.276,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 17  
Rincian Aset Lancar  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
3	Belanja Dibayar di Muka ( <i>Prepaid</i> )	0,00	0,00
4	Piutang Bukan Pajak	3.720.000,00	22.037.649,00
5	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih -	(18.600,00)	(110.188,00)
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0,00	0,00
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	0,00	0,00
8	Persediaan	734.839.969,00	924.356.815,00
	<b>Total</b>	<b>738.541.369,00</b>	<b>946.284.276,00</b>

**C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00 juta

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang di rekening Bank BNI No.acc 989003662745	0,00	0,00
Uang Tunai	0,00	0,00
Uang Muka/Voucher	0,00	0,00
Kuitansi UP yang belum di SPM GU	0,00	0,00
Pembulatan	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00 juta

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
<b>a</b>	<b>Pendapatan yang ada di Bendahara Pengeluaran</b>		
1	Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara	0,00	0,00
2	Pengembalian Belanja belum disetor ke Kas Negara	0,00	0,00
3	Kelebihan Gaji pegawai yang belum di setor	0,00	0,00
4	TKPK yang belum di setor	0,00	0,00
5	Honor yang belum di setor	0,00	0,00
6	Pendapatan Sewa yang belum disetor	0,00	0,00
	<b>Total Pendapatan yang ada di Bendahara Pengeluaran (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya</b>		
1	Uang Gaji yang belum di bayarkan Tahun 2018	0,00	0,00
2	Uang Gaji yang belum di bayarkan Tahun 2017	0,00	0,00
3	SPPD yang belum dibayarkan	0,00	0,00
4	TKPK yang belum di bayarkan	0,00	0,00
5	Uang Makan yang belum dibayarkan Tahun 2018	0,00	0,00
6	Uang Makan yang belum dibayarkan Tahun 2017	0,00	0,00
	<b>Total Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>		
1	Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00	0,00
	<b>Total Utang Jangka Pendek Lainnya (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL (a+b+c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Rincian penyetoran ke kas negara dan pembayaran kepada pihak lain atas saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 30)

#### C.2.1.3. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

*Belanja Dibayar di Muka (Prepaid) Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

#### C.2.1.4. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak Rp3,72 juta* Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.720.000,00 dan Rp22.037.649,00, terjadi penurunan sebesar Rp18.317.649,00 atau 83,12%. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak terdiri dari Piutang PNBPN dan Piutang Lainnya.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Piutang Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Piutang PNBPN	0,00
2	Piutang Lainnya	3.720.000,00
	Jumlah	3.720.000,00

#### C.2.1.4.1 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.720.000,00 dan Rp22.037.649,00, terjadi penurunan sebesar Rp18.317.649,00 atau 83,12%.

Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, misalnya: kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 20  
Rincian Mutasi Piutang Lainnya  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	22.037.649,00
Mutasi Tambah :	
Kelebihan belanja perjalanan dinas dan belanja barang non operasional lainnya	3.720.000,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>3.720.000,00</b>
Mutasi Kurang :	
Pelunasan s.d 31 Desember 2022	22.037.649,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>22.037.649,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>(18.317.649,00)</b>
Saldo per 31 Desember 2022	3.720.000,00

Mutasi tambah sebesar Rp3.720.000,00 berasal dari:

1. Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung, namun pada tanggal 31 Desember 2022 masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp3.360.000,00;
2. Kelebihan belanja barang non operasional lainnya, namun pada tanggal 31 Desember 2022 masih belum disetor oleh pegawai sebesar Rp360.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp22.037.649,00 berasal dari:

1. Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan belanja perjalanan dinas per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.367.346,00;
2. Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan belanja barang non operasional lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.476.303,00;
3. Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan belanja jasa penanganan covid-19 sebesar Rp176.000,00;
4. Penyetoran atas saldo Piutang Lainnya berupa kelebihan uang makan PNS per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.000,00.

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.720.000,00 terdiri dari:

1. Kelebihan belanja perjalanan dinas per tanggal 31 Desember 2022 yang masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas sebesar Rp3.360.000,00;
2. Kelebihan belanja barang non operasional lainnya per tanggal 31 Desember 2022 yang masih belum disetor sebesar Rp360.000,00

*(Rincian Daftar Penyetoran Piutang Lainnya dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)*

**C.2.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak**

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih –  
Piutang Bukan  
Pajak Rp(0,02)  
juta

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(18.600,00) dan Rp110.188,00.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 21  
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang PNBP	0,00
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Lainnya	(18.600,00)
	Jumlah	(18.600,00)

**C.2.1.5.1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya**

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(18.600,00) dan Rp110.188,00, terjadi penurunan sebesar Rp91.588,00 atau 83,12%.

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya berasal dari kelebihan perjalanan dinas, kelebihan belanja barang non operasional lainnya sebesar Rp3.720.000,00 dikategorikan dalam kualitas lancar, sehingga Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya sebesar Rp3.720.000,00 x 5% yaitu sebesar Rp18.600,00.

**C.2.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

(Daftar Rekapitulasi Piutang Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

**C.2.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.  
(Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

**C.2.1.8. Persediaan**

*Persediaan Rp734,84 juta* Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp734.839.969,00 dan Rp924.356.815,00, terjadi penurunan sebesar Rp189.516.846,00 atau 20,50%. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  
Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 22  
Rincian Perbandingan Persediaan  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Barang Konsumsi	497.503.034,00	588.783.407,00
2	Bahan untuk pemeliharaan	150.047.524,00	226.117.915,00
3	Suku Cadang	12.210.525,00	12.754.375,00
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	0,00	0,00
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00
6	Bahan Baku	0,00	0,00
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0,00	0,00
8	Persediaan Lainnya	75.078.886,00	96.701.118,00
	<b>TOTAL</b>	<b>734.839.969,00</b>	<b>924.356.815,00</b>

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 pada Aplikasi SAKTI Modul GLP dan Modul Persediaan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 23  
Rincian Perbandingan Nilai Persediaan pada Modul GLP dan Modul Persediaan  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Persediaan	Modul GLP	Modul Persediaan	Selisih
1	Barang Konsumsi	497.503.034,00	497.503.034,00	0,00
2	Bahan untuk pemeliharaan	150.047.524,00	150.047.524,00	0,00
3	Suku Cadang	12.210.525,00	12.210.525,00	0,00
4	Pita, Cukai, Materai dan Leges	0,00	0,00	0,00
5	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6	Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
7	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00
8	Persediaan Lainnya	75.078.886,00	75.078.886,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>734.839.969,00</b>	<b>734.839.969,00</b>	<b>0,00</b>

Persediaan tersebut di atas digunakan untuk kegiatan operasional Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam kondisi baik.

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 hasil belanja barang yang belum digunakan dalam kondisi baik per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Rincian Nilai Persediaan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19  
Per 31 Desember 2022

(Dalam rupiah)

No.	Nama Barang Persediaan	Unit	Nilai Rupiah
1.	Masker Medis	0	0,00
2.	Masker Non Medis	2	421.800,00
3.	Disinfektan	0	0,00
4.	Swab Test	10	6.177.000,00
Total			6.598.800,00

(Laporan Barang Persediaan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 26)

### C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap  
Rp292.939,13  
juta

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp292.939.134.599,00 dan Rp296.019.315.921,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 25  
Rincian Perbandingan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Tanah	175.888.101.000,00	175.888.101.000,00
2	Peralatan dan Mesin	57.165.974.752,00	57.102.007.851,00
3	Gedung dan Bangunan	117.849.869.146,00	117.446.145.385,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.482.874.463,00	46.482.874.463,00
5	Aset Tetap Lainnya	393.730.121,00	390.961.871,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>397.780.549.482,00</b>	<b>397.310.090.570,00</b>
7	Akumulasi Penyusutan	104.841.414.883,00	101.290.774.649,00
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>292.939.134.599,00</b>	<b>296.019.315.921,00</b>

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2022 pada Aplikasi SAKTI Modul GLP dan Modul Aset Tetap tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 26  
Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Modul GLP dan Modul Aset Tetap  
Per 31 Desember 2022

(dalamRupiah)

No.	Uraian	Modul GLP	Modul Aset Tetap	Selisih
1	Tanah	175.888.101.000,00	175.888.101.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	57.165.974.752,00	57.165.974.752,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	117.849.869.146,00	117.849.869.146,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.482.874.463,00	46.482.874.463,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	393.730.121,00	393.730.121,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>397.780.549.482,00</b>	<b>397.780.549.482,00</b>	<b>0,00</b>
7	Akumulasi Penyusutan	104.841.414.883,00	104.841.414.883,00	0,00
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>292.939.134.599,00</b>	<b>292.939.134.599,00</b>	<b>0,00</b>

#### C.2.2.1. Tanah

Tanah  
Rp175.888,10  
juta

Nilai Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp175.888.101.000,00 dan Rp175.888.101.000,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 27  
Rincian Mutasi Tanah  
per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>175.888.101.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	0,00
Selisih revaluasi aset	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>175.888.101.000,00</b>



Selama Tahun 2022 tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang atas saldo Tanah per 31 Desember 2021.

Penambahan Tanah yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:  
(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja Modal untuk Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
531111	Belanja Modal Tanah	0,00
	Jumlah Belanja	0,00

Selama periode Tahun 2022 tidak ada penambahan Tanah yang dihasilkan oleh Belanja Modal Tanah maupun belanja belanja lainnya.

Rincian saldo Tanah per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (M2)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4.826	52.219.101.000,00
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	0	0,00
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	0	0,00
4	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	0	0,00
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.927	123.669.000.000,00
6	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>8.753</b>	<b>175.888.101.000,00</b>

(Rincian mengenai lokasi, luas, dan status kepemilikan tanah dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

#### C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Rp57.165,97 juta

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp57.165.974.752,00 dan Rp57.102.007.851,00, terjadi penurunan sebesar Rp63.966.901,00 atau 0,11%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 28  
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>57.102.007.851,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penambahan Saldo Awal	0,00
Pembelian	533.290.200,00
Transfer Masuk	176.500.000,00
Pembatalan Penghapusan	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133.544.100,00
Transaksi Normalisasi Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>843.334.300,00</b>
<b>Pengurangan :</b>	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	21.978.000,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Penghentian Aset Dari Penggunaan	757.389.399,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>779.367.399,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>63.966.901,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>57.165.974.752,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	55.118.348.327,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>2.047.626.425,00</b>

Mutasi Tambah sebesar Rp843.334.300,00 berasal dari:

1. Pembelian sebesar Rp533.290.200,00 antara lain pembelian alat angkutan minibus/mobil, sepeda motor, PC Unit dan peralatan mesin lainnya.
2. Transfer masuk sebesar Rp176.500.000,00 merupakan transfer barang peralatan mesin dari satker Setjen.
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp133.544.100,00 dari belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa penambahan security acces elevator yang dikapitalisasi.

Mutasi Kurang sebesar Rp779.367.399,00 berasal dari:

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp 21.978.000,00 dari belanja modal peralatan dan Mesin untuk pembelian dental compressor yang merupakan kegiatan pemeliharaan dental unit sehingga tidak dikapitalisasi.
2. Transaksi penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp757.389.399,00.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	533.290.200,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total</b>	<b>533.290.200,00</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	533.290.200,00
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00
<b>Total</b>		<b>533.290.200,00</b>

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dihasilkan oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin sama dengan realisasi belanja modal dengan selisih sebesar Rp0,00.

Pada tahun 2022, tidak ada Peralatan dan Mesin yang diperoleh dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

Rincian nilai Peralatan dan Mesin per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Elevator/Lift	5	5.481.999.476,00
2	Stationary Generating Set	1	2.206.791.422,00
3	Kendaraan roda 4/6	12	3.162.395.000,00
4	Kendaraan roda 2	7	134.433.000,00
5	Mesin Fotocopy Electronic	4	201.061.500,00
6	Lemari Besi/Metal	113	458.859.360,00
7	Meja Kerja Kayu	383	1.249.004.400,00
8	Kursi Besi/Metal	1.277	1.340.013.080,00
9	Sice	120	636.319.050,00
10	Workstation	27	645.122.060,00
11	A.C. Split	204	8.148.715.487,00
12	Local Area Network (LAN)	3	1.653.992.640,00
13	P.C Unit	83	1.288.914.913,00
14	Note Book	61	1.156.394.860,00
15	Printer (Peralatan Personal Komputer)	136	587.731.688,00
16	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	48	1.063.839.480,00
17	Server	1	76.982.400,00
18	Peralatan dan mesin lainnya	3.394	27.673.404.936,00
<b>Total</b>		<b>5.879</b>	<b>57.165.974.752,00</b>

### C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan  
Rp117.849,87  
juta

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp117.849.869.146,00 dan Rp117.446.145.385,00 terjadi kenaikan sebesar Rp403.723.761,00 atau 0,34%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 29  
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>117.446.145.385,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	189.864.612,00
Transfer Masuk	0,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Pengembangan Nilai Aset	213.859.149,00
Pengembangan Melalui KDP	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>403.723.761,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Koreksi Pencatatan Nilai	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>403.723.761,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>117.849.869.146,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	15.158.600.013,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>102.691.269.133,00</b>

Mutasi Tambah sebesar Rp404.723.761,00 berasal dari:

1. Transaksi pembelian sebesar Rp189.864.612,00 merupakan bangunan kantin gedung kantor perwakilan.
2. Pengembangan nilai aset sebesar Rp213.859.149,00 merupakan pengembangan untuk bangunan gedung BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Mutasi Kurang sebesar Rp0,00.

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	189.864.612,00
Pengembangan Nilai Aset	213.859.149,00
KDP Penyelesaian	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>403.723.761,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	403.723.761,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>403.723.761,00</b>

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dihasilkan oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan sama dengan realisasi belanja modal dengan selisih sebesar Rp0,00 .

Pada tahun 2022, tidak ada Gedung dan Bangunan yang diperoleh dalam rangka Penanganan Pandemi COVID-19.

Rincian saldo Gedung dan Bangunan per jenis barang adalah sebagai berikut

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	113.327.025.839,00
2	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	0	0,00
3	Bangunan Gedung Tertutup Semi Permanen	0	0,00
4	Bangunan Klinik/Puskesmas	0	0,00
5	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	0,00
6	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	0,00
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	0,00
8	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	0	0,00
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	0,00
10	Bangunan Lainnya	0	0,00
11	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	0	0,00
12	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	781.494.000,00
13	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3	584.706.000,00
14	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	10	1.598.812.168,00
15	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	0,00
16	Gedung dan Bangunan lainnya	7	1.557.831.139,00
<b>Total</b>		<b>22</b>	<b>117.849.869.146,00</b>

#### C.2.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp46.482,87 juta

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp46.482.874.463,00 dan Rp46.482.874.463,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30  
Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Per 31 Desember 2022

No	Keterangan	Jumlah
1	Jalan dan Jembatan	663.531.000,00
2	Irigasi	3.950.000,00
3	Jaringan	45.815.393.463,00
<b>Total</b>		<b>46.482.874.463,00</b>

**C.2.2.4.1. Jalan dan Jembatan**

Nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp663.531.000,00 dan Rp663.531.000,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Tabel 31  
Rincian Mutasi Jalan dan Jembatan  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>663.531.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>663.531.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	529.484.334,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>134.046.666,00</b>

Pada Tahun 2022 tidak ada Mutasi Tambah maupun mutasi kurang atas saldo Aset Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021.

Penambahan Jalan dan Jembatan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Realisasi belanja modal yang menambah Jalan dan Jembatan sebesar Rp0,00.

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>

Rincian saldo Jalan dan Jembatan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Jalan Khusus Komplek	3.927	663.531.000,00
2	Jalan dan Jembatan Lainnya	0	0,00
3	Gedung dan Bangunan lainnya	0	0,00
<b>Total</b>		<b>3.927</b>	<b>663.531.000,00</b>

#### C.2.2.4.2. Irigasi

Nilai Irigasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.950.000,00 dan Rp3.950.000,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Rincian Mutasi Irigasi  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>3.950.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	0,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Reklas masuk	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>3.950.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	886.732,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>3.063.268,00</b>

Mutasi Tambah Irigasi selama periode Tahun 2022 sebesar Rp0,00 begitu juga dengan Mutasi Kurang sebesar Rp0,00.

Penambahan Irigasi yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Penambahan Irigasi sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Rincian nilai Irigasi per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Saluran Drainage	0	0,00
2	Sumur Artetis	0	0,00
3	Bak Penampung/Kolam/Menara Penampungan	0	0,00
4	bak Penyimpanan/Tower Air Baku	0	0,00
5	Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	1	3.950.000,00
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>3.950.000,00</b>

#### C.2.2.4.3. Jaringan

Nilai Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp45.815.393.463,00 dan Rp45.815.393.463,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 33  
Rincian Mutasi Jaringan  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>45.815.393.463,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	0,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0,00
Reklas masuk	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	
Transfer Keluar	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>45.815.393.463,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	34.034.095.477,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>11.781.297.986,00</b>

Mutasi tambah Jaringan selama periode Tahun 2022 sebesar Rp0,00, begitu juga mutasi kurang sebesar Rp0,00.



Penambahan Jaringan yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Penambahan Jaringan sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>

Rincian saldo Jaringan per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	2	1.838.833.520,00
2	Instalasi Air Kotor Lainnya	1	914.727.616,00
3	Bak Penampung Sampah Lainnya	1	48.416.197,00
4	Instalasi Generating Set	1	944.983.446,00
5	Instalasi AC	2	18.984.898.689,00
6	Instalasi Building Automation System (BAS)	0	0,00
7	Instalasi Lain-lain	9	9.292.068.597,00
8	Jaringan Listrik Lainnya	5	13.791.465.398,00
9	Jaringan Lainnya	0	0,00
	<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>45.815.393.463,00</b>

#### C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp393,73 juta

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp393.730.121,00 dan Rp390.961.871,00 merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Rincian Aset Tetap Lainnya  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Aset Tetap dalam Renovasi	0,00
2	Aset Tetap Lainnya	393.730.121,00
	<b>Total</b>	<b>393.730.121,00</b>

**C.2.2.5.1. Aset Tetap Lainnya**

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp393.730.121,00 dan Rp390.961.871,00, terjadi kenaikan sebesar Rp2.768.250,00 atau 0,71%.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 35  
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
Saldo per 31 Desember 2021	390.961.871,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	2.768.250,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>2.768.250,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>2.768.250,00</b>
Saldo per 31 Desember 2022	393.730.121,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>393.730.121,00</b>

Mutasi Tambah sebesar Rp2.768.250,00 merupakan transaksi transfer masuk aset tetap lainnya dari Satker Setjen berupa monografi senilai Rp2.768.250,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp0,00.

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per jenis barang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai (Rp)
1	Monografi	2.880	322.317.621,00
2	Lukisan Cat Minyak	17	66.692.500,00
3	Aset Tetap lainnya	41	4.720.000,00
<b>Total</b>		<b>2.938</b>	<b>393.730.121,00</b>

#### C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi Dalam Pengerjaan* Rp0,00 juta  
Tidak terdapat saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### C.2.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap* Rp104.841,41 juta  
Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp104.712.266.383,00 dan Rp104.841.414.883,00, terjadi kenaikan sebesar Rp3.550.640.234,00 atau 3,51%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	175.888.101.000,00	0,00	175.888.101.000,00
2	Peralatan dan Mesin	57.165.974.752,00	55.118.348.327,00	2.047.626.425,00
3	Gedung dan Bangunan	117.849.869.146,00	15.158.600.013,00	102.691.269.133,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.482.874.463,00	34.564.466.543,00	11.918.407.920,00
5	Aset Tetap Lainnya	393.730.121,00	0,00	393.730.121,00
<b>Total</b>		<b>397.780.549.482,00</b>	<b>104.841.414.883,00</b>	<b>292.939.134.599,00</b>

Sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.

(Rincian Nilai, Beban Penyusutan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Lampiran A.1)  
(Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan dapat dilihat dalam Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 18, 19, dan 20)

**C.2.3. PIUTANG JANGKA PANJANG**

*Piutang Jangka Panjang Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**C.2.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

*Piutang Tagihan TP/TGR Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**C.2.3.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP/TGR Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**C.2.4. ASET LAINNYA**

*Aset Lainnya Rp0,00 juta* Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Rincian Aset Lainnya pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 37  
Rincian Perbandingan Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Aset Tak Berwujud	1.200.182.673,00	1.200.182.673,00
2	Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.200.182.673,00</b>	<b>1.200.182.673,00</b>
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	1.200.182.673,00	1.200.182.673,00
	<b>Nilai Buku Aset Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp1.200,18 juta

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.200.182.673,00 dan Rp1.200.182.673,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berupa Software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38

Rincian Aset Tak Berwujud  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai
1.	Software	1.200.182.673,00
2.	Lisensi	0,00
3.	Aset Tak Berwujud lainnya	0,00
	<b>Total</b>	<b>1.200.182.673,00</b>

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 16)

##### C.2.4.1.1.

#### Software

Saldo *Software* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.200.182.673,00 dan Rp1.200.182.673,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Rincian penambahan dan pengurangan *Software* adalah sebagai berikut:

Tabel 39  
Rincian Mutasi *Software*  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	1.200.182.673,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Transfer Keluar	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>1.200.182.673,00</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	<b>1.200.182.673,00</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>0,00</b>

Mutasi Tambah Aset *Software* selama Tahun 2022 sebesar Rp0,00, begitu pula Mutasi Kurang sebesar Rp0,00.

Penambahan *Software* yang dihasilkan oleh Belanja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Transaksi	Nilai
Pembelian	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Penambahan *Software* sebesar Rp0,00 tersebut bersumber dari realisasi belanja sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Jumlah
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00
5361	Belanja Modal Fisik Lainnya	0,00
52	Belanja Modal	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>

#### C.2.4.2. Aset Lain-Lain

*Aset Lain-lain*  
Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### C.2.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi*  
*Penyusutan/*  
*Amortisasi Aset*  
*Lainnya*  
Rp1.200,18 juta

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.200.182.673,00 dan Rp1.200.182.673,00, tidak terjadi kenaikan atau penurunan.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Khusus Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan merupakan akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	1.200.182.673,00	1.200.182.673,00	0,00
2	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lainnya	1.200.182.673,00	1.200.182.673,00	0,00

#### C.2.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

*Kewajiban  
Jangka Pendek  
Rp623,13 juta*

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp623.127.183,00 dan Rp637.746.838,00.

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 40  
Rincian Kewajiban Jangka Pendek  
Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	331.539.549,00	235.200.131,00
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima dimuka	291.587.634,00	402.546.707,00
5	Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>623.127.183,00</b>	<b>637.746.838,00</b>

##### C.2.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada  
Pihak Ketiga  
Rp331,54  
juta*

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp331.539.549,00 dan Rp235.200.131,00, terjadi kenaikan sebesar Rp96.339.418,00 atau 40,96%.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp331.539.549,00 terdiri dari:

Tabel 41  
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No.Akun	Keterangan	Jumlah
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	47.043.730,00
212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	284.495.819,00
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0,00
212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>331.539.549,00</b>

Rincian penambahan dan pengurangan Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 42  
Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	<b>235.200.131,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	47.043.730,00
Belanja Barang yang masih harus dibayar	284.495.819,00
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>331.539.549,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pembayaran Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	0,00
Pembayaran Belanja Barang yang masih harus dibayar	235.200.131,00
Utang kepada pihak ketiga lainnya	0,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>235.200.131,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>96.339.418,00</b>
<b>Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022</b>	<b>331.539.549,00</b>

Mutasi tambah sebesar Rp331.539.549,00 berasal dari:

1. Adanya kekurangan gaji/uang makan/TKPK/tunjangan yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.043.730,00.
2. Adanya kekurangan belanja barang berupa listrik/telepon/air yang belum dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp284.495.819,00.

Mutasi kurang sebesar Rp235.200.131,00 berasal dari:

1. Adanya pembayaran utang Belanja langganan listrik per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.244.645,00;
2. Adanya pembayaran utang Belanja langganan telepon per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.838.681,00;
3. Adanya pembayaran utang Belanja langganan air per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.116.805,00.



Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp331.539.549,00 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp47.043.730,00 meliputi:
  - a. Kekurangan gaji dan tunjangan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.386.730,00;
  - b. Kekurangan uang makan per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.657.000,00;
2. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp284.495.819,00 meliputi:
  - a. Belanja langganan listrik sebesar Rp274.412.636,00;
  - b. Belanja langganan telepon sebesar Rp9.920.246,00;
  - c. Belanja langganan air sebesar Rp162.937,00.

*(Daftar Pembayaran Saldo Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan Rincian Rekapitulasi Perhitungan masing-masing sub akun Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)*

#### **C.2.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan**

*Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.  
*(Rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per satuan kerja dapat dilihat dalam Lampiran 25)*

#### **C.2.5.3. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan**

*Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.  
*(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)*

#### **C.2.5.4. Pendapatan Diterima di Muka**

*Pendapatan Diterima di Muka Rp291,59 juta* Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp291.587.634,00 dan Rp402.546.707,00, terjadi penurunan sebesar Rp110.959.073,00 atau 27,56%.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun Barang/Jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Sewa Diterima di Muka.

Rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagai berikut:

Tabel 43  
Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka  
Per 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Jenis Transaksi	Nilai
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	402.546.707,00
<b>Mutasi Tambah:</b>	
Nilai sewa penempatan ATM dan Menara Telkom yang belum digunakan per 31 Desember 2022	291.587.634,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>291.587.634,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
Jurnal balik per 1 Januari 2022 atas nilai sewa penempatan ATM dan Menara Telkom yang belum digunakan per 31	402.546.707,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>402.546.707,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>(110.959.073,00)</b>
<b>Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022</b>	<b>291.587.634,00</b>

Saldo Akun Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp291.587.634,00 terdiri dari Nilai sewa gedung & bangunan yang belum digunakan pada BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp291.587.634,00.

(Rincian dan perhitungan Pendapatan Sewa Diterima di Muka dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 34)

#### C.2.5.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka  
dari KPPN  
Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Uang Muka Dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan

#### C.2.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka  
Pendek Lainnya  
Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### C.2.6. EKUITAS

Ekuitas  
Rp293.054,55  
juta

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp293.054.548.785,00 dan Rp296.327.853.359,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL**

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 44  
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional	(36.239.424.370,00)	(36.551.729.093,00)	(0,85)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	97.077.333,00	89.221.461,00	8,80
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>(36.142.347.037,00)</b>	<b>(36.462.507.632,00)</b>	<b>(0,88)</b>

Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp36.239.424.370,00 terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp112.243.043,00 dan Beban Operasional sebesar Rp36.351.667.413,00.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp97.077.333,00 terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp97.077.333,00, Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00, serta Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

*(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 8)*

**D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL**

*Pendapatan Operasional Rp112,24 juta*

Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp112.243.043,00 dan Rp63.601.294,00. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya masing-masing sebesar Rp112.243.043,00 dan Rp63.601.294,00 terjadi kenaikan sebesar Rp48.641.749,00 atau 76,48%.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 45  
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	112.243.043,00	63.601.294,00	76,48
2	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>112.243.043,00</b>	<b>63.601.294,00</b>	<b>76,48</b>

Pendapatan LO Tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 antara lain dikarenakan kenaikan pengakuan pendapatan pada tahun 2022 atas nilai sewa pemasangan dan penempatan perangkat komunikasi Tahun 2022 dibandingkan pengakuan pendapatan sewa pada tahun 2021.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp112.243.043,00 terdiri atas:

- Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp38.815.334,00 berasal dari sewa penempatan ATM.
- Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp72.143.739,00 berasal dari sewa penempatan perangkat telekomunikasi.
- Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.283.970,00 berasal dari sewa rumah dinas.

#### D.2.2. BEBAN OPERASIONAL

*Beban Operasional Rp36.351,67 juta*

Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp36.351.667.413,00 dan Rp36.615.330.387,00.

Beban Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Tabel 46  
Rincian Perbandingan Beban Operasional  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Pegawai	12.096.111.469,00	11.362.021.309,00	6,46
2	Beban Persediaan	929.000.447,00	1.148.978.399,00	(19,15)
3	Beban Barang dan Jasa	7.359.898.776,00	7.293.600.300,00	0,91
4	Beban Pemeliharaan	5.885.090.217,00	5.256.041.146,00	11,97
5	Beban Perjalanan Dinas	5.975.774.471,00	7.386.582.725,00	(19,10)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.105.792.033,00	4.168.106.508,00	(1,50)
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00
8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Beban Operasional</b>	<b>36.351.667.413,00</b>	<b>36.615.330.387,00</b>	<b>(0,72)</b>

#### D.2.2.1. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp12.096,11  
juta*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp12.096.111.469,00 dan Rp11.362.021.309,00, terjadi kenaikan sebesar Rp734.090.160,00 atau 6,46%. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 47  
Rincian Beban Pegawai  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Gaji	8.478.891.837,00	8.533.503.974,00	(0,64)
2	Beban Tunjangan-Tunjangan	3.005.640.632,00	2.279.723.335,00	31,84
3	Beban Honorarium dan Vakasi	0,00	0,00	0,00
4	Beban Lembur	611.579.000,00	548.794.000,00	11,44
	<b>Jumlah</b>	<b>12.096.111.469,00</b>	<b>11.362.021.309,00</b>	<b>6,46</b>

#### D.2.2.2. Beban Persediaan

*Beban  
Persediaan  
Rp929,00  
juta*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp929.000.447,00 dan Rp1.148.978.399,00, terjadi penurunan sebesar Rp219.977.952,00 atau 19,15%. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 48

Rincian Beban Persediaan

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Persediaan Konsumsi	775.218.915,00	800.446.491,00	(3,15)
2	Beban Persediaan Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
3	Beban Persediaan Lainnya	153.781.532,00	348.531.908,00	(55,88)
	<b>Jumlah</b>	<b>929.000.447,00</b>	<b>1.148.978.399,00</b>	<b>(19,15)</b>

**D.2.2.3. Beban Barang dan Jasa**

*Beban Barang dan Jasa Rp7.359,90 juta*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.359.898.776,00 dan Rp7.293.600.300,00, terjadi kenaikan sebesar Rp66.298.476,00 atau 0,91%. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49

Rincian Beban Barang dan Jasa

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
<b>Beban Barang</b>				
1	Beban Barang Operasional	730.197.044,00	725.948.968,00	0,59
2	Beban Barang Non Operasional	3.160.041.702,00	3.636.233.589,00	(13,10)
3	Beban Kontribusi	0,00	0,00	0,00
<b>Beban Jasa</b>				
1	Beban Langganan Daya dan Jasa	2.913.960.700,00	2.624.953.443,00	11,01
2	Beban Jasa Pos dan Giro	0,00	0,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultan	0,00	0,00	0,00
4	Beban Sewa	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00
5	Beban Jasa Profesi	27.200.000,00	20.450.000,00	33,01
6	Beban Jasa Lainnya	331.945.330,00	71.177.800,00	366,36
7	Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	11.754.000,00	30.036.500,00	(60,87)
<b>Beban Barang Lainnya</b>				
1	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
3	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.359.898.776,00</b>	<b>7.293.600.300,00</b>	<b>0,91</b>

**D.2.2.4. Beban Pemeliharaan**

*Beban Pemeliharaan Rp5.885,09juta*

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.885.090.217,00 dan Rp5.256.041.146,00, terjadi kenaikan sebesar Rp629.049.071,00 atau 11,96%. Beban Pemeliharaan merupakan beban

yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 50  
Rincian Beban Pemeliharaan  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.975.540.177,00	3.472.192.082,00	14,50
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.677.538.146,00	1.461.475.125,00	14,78
3	Beban Pemeliharaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	208.729.882,00	247.461.617,00	(15,65)
5	Beban Persediaan Suku Cadang	23.282.012,00	74.912.322,00	(68,92)
6	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.885.090.217,00</b>	<b>5.256.041.146,00</b>	<b>11,97</b>

#### D.2.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp5.975,77  
juta

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.975.774.471,00 dan Rp7.386.582.725,00, terjadi penurunan sebesar Rp1.410.808.254,00 atau 19,10%. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 51  
Rincian Beban Perjalanan Dinas  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Jenis Beban	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Perjalanan Biasa	4.693.114.471,00	6.550.632.725,00	(28,36)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	725.700.000,00	835.950.000,00	(13,19)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	556.960.000,00	0,00	(100,00)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.975.774.471,00</b>	<b>7.386.582.725,00</b>	<b>(19,10)</b>

#### D.2.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp4.105,79  
juta

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.105.792.033,00 dan Rp4.168.106.508,00, terjadi penurunan sebesar Rp62.314.475,00 atau 1,49%. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 52  
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	966.448.170,00	1.036.673.772,00	(6,77)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.630.745.679,00	2.622.834.552,00	0,30
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	508.598.184,00	508.598.184,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>4.105.792.033,00</b>	<b>4.168.106.508,00</b>	<b>(1,50)</b>
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
6	Beban Penyusutan aset lain-lain	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>4.105.792.033,00</b>	<b>4.168.106.508,00</b>	<b>(1,50)</b>

#### D.2.2.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### D.2.2.8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain  
Rp0,00 juta

Tidak terdapat saldo Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

#### D.2.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non  
Operasional  
Rp97,08 juta

Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp97.077.333,00 dan Rp89.221.461,00.

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:



Tabel 53  
Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	97.077.333,00	89.237.890,00	8,78
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	101.433.333,00	89.237.890,00	13,67
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	4.356.000,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	(16.429,00)	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	16.429,00	(100,00)
<b>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>97.077.333,00</b>	<b>89.221.461,00</b>	<b>8,80</b>

#### D.2.3.1. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

*Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Rp97,08 juta*

Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp97.077.333,00 dan Rp89.237.890,00, terjadi kenaikan sebesar Rp7.839.443 atau 8,78%. Surplus atau Defisit Pelepasan Aset Non Lancar merupakan kegiatan pelepasan Aset yang meliputi pendapatan hasil lelang dikurangi beban yang ditimbulkan atas selisih kurang nilai lelang dari nilai buku Aset Non Lancar.

Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 54  
Rincian Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	<b>Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
	a Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	b Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	101.433.333,00	89.237.890,00	13,67
	<b>Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>101.433.333,00</b>	<b>89.237.890,00</b>	<b>13,67</b>
2	<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>			
	a Beban Kerugian Pelepasan Aset		0,00	0,00
	<b>Beban Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>4.356.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>97.077.333,00</b>	<b>89.237.890,00</b>	<b>8,78</b>

#### D.2.3.2. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp0,00 juta*

Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(16.429,00), terjadi kenaikan sebesar Rp16.429,00 atau 100%. Surplus atau Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan kegiatan menerima pendapatan yang

bukan pendapatan operasional dikurangi beban yang bukan beban operasional.

Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 55  
Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
a	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0,00	0,00	0,00
b	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
c	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
d	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
e	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0,00	0,00	0,00
f	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
g	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
a	Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	0,00	0,00	0,00
b	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	16.429,00	0,00
	<b>Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>16.429,00</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.429,00)</b>	<b>(100,00)</b>

#### D.2.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa  
Rp0,00 juta

Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

**E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 56  
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021  
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>296.327.853.359,00</b>	<b>297.338.158.369,00</b>	<b>(0,34)</b>
Surplus/Defisit LO	(36.142.347.037,00)	(36.462.507.632,00)	(0,88)
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(129.323.004,00)	(513.258.544,00)	(74,80)
Transaksi Antara Entitas	32.998.365.467,00	35.965.461.166,00	(8,25)
<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>(3.273.304.574,00)</b>	<b>(1.010.305.010,00)</b>	<b>223,99</b>
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>293.054.548.785,00</b>	<b>296.327.853.359,00</b>	<b>(1,10)</b>

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar Rp296.327.853.359,00.

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp(36.142.347.037,00).

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp(129.323.004,00).

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp32.998.365.467,00.

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp293.054.548.785,00.

*(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)*

**E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**E.2.1. EKUITAS AWAL**

*Ekuitas Awal Rp  
Rp296.327,85  
juta*

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp296.327.853.359,00 dan Rp297.338.158.369,00.

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

**E.2.2. SURPLUS (DEFISIT) LO**

*Surplus (Defisit) LO Rp(36.142,34) juta* Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(36.142.347.037,00) dan Rp(36.462.507.632,00).  
Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**E.2.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

*Koreksi Yang Menambah / Mengurangi Ekuitas Rp(129,32) juta* Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan Penyesuaian nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi serta Koreksi Lain-lain yang dilakukan pada periode berjalan terhadap nilai ekuitas dari akun-akun Aset pada tahun lalu.

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(129.323.004,00) dan Rp(513.258.544,00).

Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 57

Rincian Perbandingan Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00
2	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Atas Reklasifikasi	0,00	(2.544.503.000,00)	(100,00)
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(133.544.100,00)	2.056.110.568,00	(106,49)
6	Lain-lain	4.221.096,00	(24.866.112,00)	(116,98)
	<b>Jumlah</b>	<b>(129.323.004,00)</b>	<b>(513.258.544,00)</b>	<b>(323,47)</b>

**E.2.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

*Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**E.2.3.2. Koreksi Nilai Persediaan**

*Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

**E.2.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi**

*Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00 juta* Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan transaksi Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian yang terjadi pada periode sebelumnya.

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(2.544.503.000,00) terjadi kenaikan sebesar Rp2.544.503.000,00 atau 100,00%.

**E.2.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

*Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00 juta* Tidak terdapat saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

**E.2.3.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

*Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp(133,54) juta* Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(133.544.100,00) dan Rp2.056.110.568,00

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi aset.

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 58  
Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
<b>Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi</b>		<b>(133.544.100,00)</b>	<b>2.056.110.568,00</b>	<b>(7,19)</b>
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	(133.544.100,00)	41.848.000,00	(4,19)
3	Gedung dan Bangunan	0,00	2.502.655.000,00	(1,00)
4	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00
5	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
6	Jaringan	0,00	0,00	0,00
7	Irigasi	0,00	0,00	0,00
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	(450.477.900,00)	(1,00)
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	(37.914.532,00)	(1,00)
10	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00
11	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00	0,00	0,00
12	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0,00	0,00	0,00
<b>Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Software	0,00	0,00	0,00
2	Lisensi	0,00	0,00	0,00
3	Akumulasi Amortisasi Software	0,00	0,00	0,00
4	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Total</b>		<b>(133.544.100,00)</b>	<b>2.056.110.568,00</b>	<b>(7,19)</b>

#### E.2.3.6. Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-lain Rp4,22 juta*

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.221.096,00 dan Rp(24.866.112,00).

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Tabel 59  
Rincian Nilai Koreksi Lain-lain  
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Koreksi	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	00,00,0
2	Piutang	0,00	0,00	00,00,0
3	Kewajiban	0,00	0,00	00,00,0
4	Pendapatan	10.816.916,00	4.998.878,00	1,16
5	Beban	(6.595.820,00)	(29.864.990,00)	(0,78)
<b>Jumlah Koreksi</b>		<b>4.221.096,00</b>	<b>(24.866.112,00)</b>	<b>(1,17)</b>

Rincian Koreksi Lain-lain senilai Rp4.221.096,00 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 berasal dari:

1. Koreksi atas Pendapatan sebesar Rp10.816.916,00 berasal dari Koreksi pendapatan atas Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL di Tahun 2022 yang melebihi saldo pengembalian belum setor Tahun 2021 sebesar Rp10.816.916,00.
2. Koreksi atas Beban sebesar (Rp6.595.820,00) berasal dari Koreksi beban atas pembayaran akun Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 di Tahun 2022 sebesar (Rp6.595.820,00).

#### E.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

*Transaksi Antar Entitas Rp32.998,37 juta*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp32.998.365.467,00 dan Rp35.965.461.166,00.

Transaksi Antar Entitas merupakan kegiatan entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 60

Rincian Perbandingan Nilai Transaksi antar Entitas

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	%
1	Diterima Dari Entitas Lain	(135.571.868,00)	(482.738.346,00)	(0,72)
2	Ditagihkan ke Entitas Lain	33.019.006.585,00	33.524.483.162,00	(0,02)
3	Transfer Masuk	114.930.750,00	2.923.716.350,00	(0,96)
4	Transfer Keluar	0,00	0,00	0,00
5	Pengesahan Hibah Langsung	0,00	0,00	0,00
6	Pengesahan Pengembalian Hibah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	32.998.365.467,00	35.965.461.166,00	(1,69)

##### E.2.4.1. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp(135.571.868,00) dan Rp(482.738.346,00).

Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp33.019.006.585,00 dan Rp33.524.483.162,00.

#### E.2.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset dan atau kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antara KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Saldo Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp114.930.750,00 dan Rp2.923.716.350,00.

Tabel 61

Tabel Rincian Nilai Transfer Masuk

Untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Satker Asal	Jenis Aset							Jumlah
		Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin		Aset Tetap Lainnya	Software		
				Nilai Perolehan	Penyusutan		Nilai Perolehan	Amortisasi	
1	Setjen Pusat	0,00	0,00	176.500.000	- 64.337.500	2.768.250	0,00	0,00	114.930.750
	Jumlah	0,00	0,00	176.500.000	- 64.337.500	2.768.250	0,00	0,00	114.930.750

Saldo Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

#### E.2.5. EKUITAS AKHIR

*Ekuitas Akhir  
Rp293.054,55  
juta*

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp293.054.548.785,00 dan Rp296.327.853.359,00.



**F.1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

**F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang dapat mempengaruhi saldo Neraca per 31 Desember 2022.

**F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Tidak ada pengungkapan lain-lain atas Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022.

**F.3. REKENING PEMERINTAH**

Rekening pemerintah yang dimiliki Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Eselon I Setjen (kode satker 662745) yang masih dipertahankan adalah Rekening Giro pada Bank BNI 46 KCU Senayan dengan nomor rekening 9890036627451000 atas nama BPG182 BPK RI Provinsi DKI JKT662745 (status aktif). KPPN Pemberi Persetujuan adalah KPPN Jakarta VII dengan surat izin momor S-217/PB.3/2020 tanggal 29 April 2020.

*(Daftar rekening pemerintah dilampirkan sebagaimana format terlampir pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 27)*

**F.4. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN OLEH KAP**

*(Rincian temuan dan Progres Tindak Lanjut atas temuan pemeriksaan KAP dilampirkan pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 28)*



**Lampiran A.3**

**BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta  
Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022**

No	Nama Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jumlah Hibah</b>							
<b>Pengembalian Hibah</b>							
<b>Total</b>							

Keterangan: Sampai dengan periode 31 Desember 2022 tidak ada realisasi hibah langsung berupa uang/barang/jasa.